

## RENDAHNYA KEMANDIRIAN DAERAH SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:  
Muhammad Zaenuddin<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Politeknik Batam

### ABSTRACT

*The research is aimed to know the local government ability in decentralization schema according to the local government financial report that using decentralization fiscal level between central and local government. The result shows that ratio between the local government income (PAD) and total income of local government (TPD) for all local government in Yogyakarta Province in 1996-2006 is very low, less than 10%. The ratio between production sharing for tax and non-tax (BHPBP) and total income of local government (TPD) is also low. Therefore, these phenomena indicate that the ratio of decentralization financial is very low. Other ways to know the local government financial report is using independent level of government local that used the income of the local government for their budget. This shows that the local government income (PAD) contribution in the total expenditure of local government (TKD) is still low; therefore the local government financial autonomy is very low. According to those results, the decentralization implementation in Yogyakarta province is not success. The factors that influence in financial autonomy level are contribution level, aid level, government funding, and economy potential. These factors contribute in local government financial level at Yogyakarta Province. This paper shows that contribution level (BM) and PDRB significantly affect local government financial level. Therefore, the BM has negative relation but PDRB has positive one to the autonomy financial level. Beside that, aid variable (BN) and government funding (PP) only have a small effect in the autonomy financial level.*

**Keywords:** decentralization, financial autonomy level, local government income

### PENDAHULUAN

Sejak tahun 2000 Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan yakni pelaksanaan desentralisasi (Otonomi Daerah) di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336 Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No. 25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah" secara prinsip mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengutamakan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah provinsi sebagai koodinator. Oleh karena itu, hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali lima bidang; Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter, Fiskal dan Agama. Konsekwensinya, terjadi peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar. Menurut Suparmoko (2002) otonomi daerah didefinisikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,

meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga upaya positif untuk peningkatan kemandirian daerah (Suparmoko,2002). Pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan di daerah. Kunci utama penentu keberhasilan Pemda dalam menjawab berbagai tantangan otonomi adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah yakni upaya Pemda untuk memusatkan perhatiannya untuk memperbesar peranan PAD dalam struktur penerimaan daerah guna meningkatkan kemandirian keuangannya.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah – yaitu

perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD- yang semakin meningkat.

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, maka proporsi penerimaan asli (PAD) terhadap total penerimaan daerah (baik untuk daerah tingkat I maupun II) ternyata Indonesia jauh lebih tertinggal. Misalnya untuk Inggris (1983) 55%, Thailand (1981) 54%, Malaysia (1981) 80%, Pakistan (1979) 89%, Srilangka (1981) 87%, Brasil (1983) 82%, Perancis (1985) 57%, dan Amerika Serikat (1983) 78% (IMF Government Financial Statistic, 1985 dalam tesis Muktiali,2000). Sedangkan untuk Indonesia besarnya proporsi PAD hanya 36,17% untuk tingkat I dan 14% untuk tingkat II (Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000, Republik Indonesia dalam tesis Muktiali,2000).

Sebagai contoh, studi Tampubolon et al (2002) tentang pelaksanaan otonomi daerah di kota besar Surabaya yang seharusnya memiliki potensi besar dalam kemandirian finansial, ternyata data pada tahun 2000-2002 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya hanya sekitar 25% dari penerimaan kota Surabaya. Fakta ini menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah kota Surabaya terhadap uluran tangan dari Pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa lebih dari lima puluh persen (50%) sumber PAD di Indonesia masih bersumber dari dana perimbangan dimana 80% dari APBD digunakan untuk pengeluaran rutin dan kurang dari 5% untuk pengeluaran modal (Miranda, 2007).

Penelitian ini bermaksud mengetahui perkembangan derajat otonomi fiskal daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah dengan mengambil studi kasus 5 (lima) kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Apakah terjadi peningkatan derajat otonomi fiskal daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dengan kata lain bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD (yang seharusnya menjadi sumber keuangan terbesar) serta bagaimana tingkat ketergantungan (fiskal) daerah terhadap bantuan pusat. Penelitian ini juga akan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal dan bagaimana hubungan antarfaktor tersebut.

## METODE PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian dan Analisis

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain:

$$1) \frac{PAD}{TPD}$$

$$2) \frac{BHPBP}{TPD}$$

$$3) \frac{Sum}{TPD}$$

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001), antara lain:

$$4) \frac{PAD}{TKD}$$

$$5) \frac{PAD}{KR}$$

$$6) \frac{PAD + BHPBP}{TKD}$$

di mana,

PAD = Pendapatan Asli Daerah  
 BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  
 TPD = Total Penerimaan Daerah  
 TKD = Total Pengeluaran Daerah  
 KR = Pengeluaran Rutin  
 Sum = Sumbangan dari Pusat

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Untuk membahas bagaimana hubungan antara derajat otonomi fiskal daerah dan faktor yang mempengaruhinya, menggunakan model sebagai berikut:

$$ADR = a_0 + a_1BM_{it} + a_2BN_{it} + a_3PDRB_{it} + a_4PP_{it} + \mu_{it}$$

di mana,

ADR	= Derajat Otonomi Fiskal Daerah
BM	= Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi
BN	= Sumbangan Pemerintah/Provinsi
PDRB	= Potensi Ekonomi Daerah
PP	= Tingkat Pembiayaan Pemerintah
$\mu$	= variable gangguan
i	= kabupaten ke-i, dan
t	= waktu

Dari persamaan di atas maka terdapat dimensi waktu (t) dan dimensi daerah (i) secara bersamaan. Dengan demikian, data yang digunakan adalah data *time series dan data cross section*. Untuk mengestimasi model dengan data *time series dan cross section* maka metode yang digunakan adalah *model pooling* data dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Untuk melihat valid tidaknya hasil estimasi yang diperoleh dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik yaitu melakukan uji autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

## 2. Definisi Operasional

- Derajat Otonomi Fiskal daerah (ADR), diukur dengan menggunakan *administrative dependent ratio* yaitu perbandingan antara PAD dan total APBD (dalam bentuk %).
- Tingkat Sumbangan Pemerintah (BM), sumbangan dari pemerintah pusat/dati I kepada Dati II dalam bentuk Subsidi Daerah Otonom (SDO). Tingkat sumbangan diukur dengan membandingkan antara besarnya sumbangan dengan APBD (dalam bentuk %).
- Tingkat Bantuan Pusat (BN), dana yang diberikan oleh pusat kepada dati I dan dati II untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Tingkat bantuan pusat diukur dengan membandingkan besarnya bantuan pusat terhadap APBD (dalam bentuk %).
- Potensi Ekonomi Daerah (PDRB), menggunakan indikator PDRB atas dasar harga berlaku (untuk menyesuaikan variabel lain yang semuanya bersatuan %, maka PDRB dalam penelitian ini dikalikan dengan  $10^{-14}$  rupiah)
- Tingkat Pembiayaan Pemerintah (PP), proporsi APBD terhadap PDRB atas harga berlaku menunjukkan tingkat pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerahnya. Menurunnya APBD terhadap PDRB mengindikasikan semakin meningkatnya peranan sektor-sektor di luar sektor pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi daerah (dalam bentuk %).

Penelitian ini menggunakan studi kasus 5 kabupaten/kota se-Provinsi DI Yogyakarta, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS DI Yogyakarta. Data yang

digunakan adalah data 1999 sampai 2006 yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Propinsi DI Yogyakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Total Daerah (TKD) dan Pengeluaran Rutin (KR), dan Sumbangan (BM) dan Bantuan (BN) dari pemerintah Pusat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keadaan Keuangan Daerah

Perkembangan Anggaran Belanja Daerah (APBD) tiap Kabupaten/Kota se-Provinsi D.I. Yogyakarta 1999-2000 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun masing-masing Kulonprogo (140.13%), Bantul (138.53%), Gunungkidul (132.48%), Sleman (129.10%), dan Kota Yogyakarta (131.25%). Kenaikan tertinggi terjadi pada 2001 (dibandingkan dengan 2000) yang mengalami kenaikan rata-rata 253.28% dimana kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Kulonprogo (314.54%) dan Bantul (291.24%). Akan tetapi, pada 2004 (dibandingkan 2003) terjadi penurunan APBD (94.13%) yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Kota Yogyakarta.

Penerimaan Asli Daerah (PAD) menjadi indikasi tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan di daerah masing-masing. Sejak 2000, hampir semua daerah Kabupaten/Kota di Yogyakarta mengalami kenaikan PAD dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing daerah per tahun adalah Kulonprogo (126,99%), Bantul (130.36%), Gunungkidul (126.12%), Sleman (127.36%), dan Kota Yogyakarta (123.21%).

### 2. Derajat Otonomi Fiskal

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pertama yang dilihat adalah bagaimana perbandingan antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) atau PAD/TPD. Makin tinggi perbandingan ini berarti menunjukkan makin tingginya derajat otonomi fiskal.

Dilihat dari data statistik masing-masing kabupaten/kota mengalami kenaikan (pertumbuhan PAD) namun relatif kecil yakni di bawah 10% (Kulonprogo mengalami rata-rata kenaikan PAD 6,39%, Bantul sebesar 6,88%, Gunungkidul 18,93%), hanya Sleman dan Kota Yogyakarta yang mengalami tingkat kenaikan PAD di atas 10% yakni masing-masing 11,22% dan 18,93%. Data ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kenaikan PAD (dibandingkan TPD) yang

menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal (dilihat dari porsi PAD terhadap APBD) masih relatif rendah, yakni di bawah 10%.

Kedua, untuk melihat derajat otonomi fiskal daerah yakni dengan melihat perbandingan antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD): BHPBP/TPD. Makin tinggi perbandingan ini menunjukkan makin tingginya derajat otonomi fiskal di masing-masing daerah.

Derajat otonomi fiskal di Kabupaten/Kota se-Provinsi D.I. Yogyakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah (2000-2006) dengan melihat perbandingan antara BHPBP dengan TPD. Sama halnya dengan perbandingan PAD dan TPD masing-masing kabupaten/kota memang mengalami kenaikan tapi sangat kecil di bawah 10% bahkan di bawah 5% (di Kulonprogo sebesar 3,71%, Bantul sebesar 4,39%, Gunungkidul 3,48%), hanya Sleman dan Kota Yogyakarta di atas 5% yakni masing-masing 6,48% dan 9,11%. Data ini juga menunjukkan masih rendahnya tingkat kenaikan BHPBP (dibandingkan TPD) yang mengindikasikan bahwa derajat otonomi fiskal (dilihat dari porsi BHPBP terhadap APBD) masih sangat rendah.

Ketiga, derajat otonomi fiskal daerah juga bisa dilihat dengan perbandingan antara Sumbangan Pemerintah Pusat (Sum) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD): Sum/TPD. Makin tinggi perbandingan ini menunjukkan makin tingginya ketergantungan masing-masing daerah kepada pemerintah pusat yang berarti menunjukkan makin menurunnya derajat otonomi daerah.

Ternyata untuk semua kabupaten/kota memiliki nilai rata-rata perbandingan Sum/TPD sangat tinggi yakni di atas 50% bahkan ada yang di atas 70% (di Kulonprogo sebesar 73.33% dan Gunungkidul sebesar 71.23%) sedangkan di Bantul, Sleman dan Yogyakarta masing-masing 68.59%, 64.54%, dan 50.56%). Bahkan sejak 2003 sumbangan pemerintah pusat mengalami *trend* kenaikan dimana pada 2006 hingga mencapai 75.24%. Data ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi yang juga mengindikasikan bahwa derajat otonomi fiskal masih sangat rendah.

Selain itu, untuk melihat kinerja keuangan daerah, dapat digunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001), melalui 3 cara. Pertama, dilihat bagaimana perbandingan PAD dibandingkan dengan tingkat pengeluaran daerah (TKD) atau PAD/TKD. Makin tinggi perbandingan ini berarti makin menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dilihat dari data statistik rata-rata tingkat perbandingan masing-masing kabupaten/kota sangat kecil yakni di bawah 10% (Kulonprogo mengalami rata-rata kenaikan PAD 6,49%, Bantul sebesar 7,07%, Gunungkidul 5,36%), hanya Sleman dan Kota Yogyakarta yang nilai

perbandingannya di atas 10% yakni masing-masing 10,98% dan 18,44%. Data ini menunjukkan bahwa peran PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) masih sangat rendah. Ini berarti menunjukkan kinerja keuangan yang diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah masih sangat rendah.

Kedua, bagaimana kontribusi atau peran PAD terhadap pembiayaan rutin (KR) di masing-masing daerah yakni dengan membandingkan PAD/KR. Makin tinggi perbandingan ini berarti menunjukkan peran PAD dalam pembiayaan rutin pembangunan makin besar. Dilihat dari data statistik rata-rata tingkat perbandingan masing-masing kabupaten/kota cukup variatif, khusus di Gunungkidul sangat kecil yakni 11.13% yang menunjukkan untuk di daerah ini peran PAD terhadap pembiayaan rutin masih sangat rendah. Sedangkan untuk Kulonprogo, Bantul dan Sleman peran PAD terhadap pembiayaan rutin cukup signifikan masing-masing 39.00%, 30.93% dan 30.53%. Sedangkan untuk Kota Yogyakarta peran PAD terhadap pembiayaan rutin pemerintah daerahnya sangat besar yakni mencapai 84.54%. Selain itu perkembangan peran PAD terhadap KR dalam tiga tahun terakhir (2004, 2005, dan 2006) mengalami *trend* kenaikan dan peran PAD terhadap KR makin besar. Ini berarti dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur dari peran PAD terhadap KR makin baik yang berarti kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan rutin makin baik.

Ketiga, dengan melihat bagaimana peran (PAD+BHPBP) terhadap TKD untuk mengukur bagaimana peranan keduanya terhadap pengeluaran total daerah. Dilihat dari data statistik rata-rata tingkat perbandingan masing-masing kabupaten/kota masih rendah sekitar 10%. Hanya di Kota Yogyakarta peran PAD dan BHPBP terhadap TKD relatif besar yakni 27.47%. Ini berarti dilihat dari kinerja keuangan daerah (kemandirian keuangan) yang diukur dari peran PAD dan BHPBP terhadap TKD masih relatif kecil.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Pertama kita uji asumsi klasik yakni ada tidaknya multikolinieritas, otokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pertama, menguji multikolinieritas. Salah satu cara mengukur multikolinieritas adalah menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*, yaitu dengan melihat sejauh mana variabel penjelas dapat diterangkan oleh semua variabel penjelas lainnya di dalam persamaan regresi. Multikolinieritas dikatakan berat apabila angka VIF dan suatu variabel melebihi 10. Dari pengolahan data diperoleh bahwa angka VIF bernilai sekitar 2-3 atau kurang dari 10. Jadi multikolinieritas tidak terjadi.

**Tabel 1. Model Summary dari Output Regresi**

**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.849 <sup>a</sup>	.721	.689	.0311358	.721	22.582	4	35	.000	1.742

a. Predictors: (Constant), PP, PDRB, BM, BN

b. Dependent Variable: ADR

Kedua, Untuk menguji ada tidaknya otokorelasi dengan menggunakan statistik *d* Durbin-Watson. Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95 persen, uji regresi dengan empat variabel dependen dan jumlah pengamatan sebanyak 35 buah, Tabel Statistik Durbin-Watson memperlihatkan nilai  $d_L=1,07$  dan  $d_U=1,63$ . Dari hasil pengolahan data (tabel 17) terlihat nilai statistik *d* sebesar 1,74 (nilai ini lebih besar dari nilai  $d_U=1,63$ , tapi juga dibawah nilai  $4-d_U=2,37$ ). Ini berarti bahwa tidak ada autokorelasi.

Ketiga, menguji heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggambarkan *scatter diagram* nilai residu (dalam hal ini terhadap ADR) dimana terlihat (dalam lampiran) bahwa residu-nya tidak membentuk suatu pola sebaran tertentu. Ini menunjukkan model tidak mengandung heteroskedastisitas.

Hasil pengolahan data memberikan hasil yang menginformasikan bahwa  $R^2$  cukup besar yaitu 0.721 yang berarti bahwa 72,1% variabel-variabel bebas dalam model ini mampu menjelaskan variasi derajat otonomi fiskal daerah secara keseluruhan. Sedangkan sisanya sebesar 27.9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.

Pada Tabel 2 (ANOVA) menunjukkan bahwa secara bersama-sama dalam periode pengamatan semua variabel bebas (tingkat sumbangan, tingkat bantuan, pembiayaan pemerintah dan PDRB) secara signifikan

mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah. Hal ini ditunjukkan pada tabel di mana nilai F-hitung sebesar 22,582 lebih besar daripada nilai F tabel  $(4,31) = 2,69$  pada derajat kepercayaan 5%.

Dari hasil pengolahan data (Tabel 3) memperlihatkan bahwa variabel tingkat sumbangan (BM) dan PDRB secara statistik signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah dengan derajat kepercayaan 5%. Variabel BM memiliki hubungan negatif dengan derajat otonomi fiskal sedangkan variabel PDRB memiliki hubungan positif dengan derajat otonomi fiskal. Sedangkan variabel bantuan (BN) dan Pembiayaan Pemerintah (PP) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal.

## KESIMPULAN

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya diukur melalui kinerja keuangan daerah yaitu menggunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) untuk semua Kabupaten/Kota di Propinsi DIY sangat rendah yakni di bawah 10%. Begitu juga rasio antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD).

**Tabel 2. ANOVA**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.088	4	.022	22.582	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.034	35	.001		
	Total	.121	39			

a. Predictors: (Constant), PP, PDRB, BM, BN

b. Dependent Variable: ADR

**Tabel 3. Hasil Regresi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.266	.043		6.163	.000	.178	.353					
BM	-.360	.056	-.826	-6.387	.000	-.474	-.245	-.641	-.734	-.570	.477	2.095
BN	-.113	.139	-.122	-.816	.420	-.395	.169	.008	-.137	-.073	.354	2.823
PDRB	1.514	.421	.545	3.598	.001	.660	2.369	.506	.520	.321	.348	2.873
PP	.164	.186	.152	.885	.382	-.212	.541	-.544	.148	.079	.269	3.711

a. Dependent Variable: ADR

Hal ini mengindikasikan bahwa derajat otonomi fiskal (dilihat dari rasio PAD dan BHPBP terhadap APBD) sangat rendah. Di sisi lain rasio antara Sumbangan Pemerintah Pusat (Sum) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten/Kota di Propinsi DIY sangat tinggi di atas 50% bahkan ada yang di atas 70%. Hal ini mengindikasikan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Cara lain untuk melihat kinerja keuangan daerah adalah dengan menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total pengeluaran daerah (TKD) sangat rendah dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa peran PAD terhadap TKD masih sangat rendah yang mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Namun temuan dalam penelitian ini, kontribusi atau peran PAD terhadap pembiayaan rutin KR cukup signifikan untuk Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Sleman masing-masing 39.00%, 30.93% dan 30.53% bahkan untuk Kota Yogyakarta peran PAD terhadap pembiayaan rutin pemerintah daerahnya sangat besar yakni mencapai 84.54%.

Dari hasil di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi DI Yogyakarta kurang berhasil. Hal ini ditandai dengan rendahnya kenaikan derajat otonomi fiskal daerah di DIY baik dilihat dari kinerja keuangan maupun tingkat kemandirian keuangannya.

Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal dan bagaimana hubungan antar faktor tersebut menunjukkan bahwa tingkat sumbangan, tingkat bantuan, pembiayaan pemerintah dan potensi ekonomi secara bersama-sama signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi D.I Yogyakarta. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel tingkat sumbangan (BM) dan PDRB secara statistik signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah dimana variabel BM memiliki hubungan negatif dan variabel PDRB memiliki hubungan positif dengan derajat otonomi fiskal. Sedangkan variabel Bantuan (BN) dan Pembiayaan Pemerintah (PP) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Erlangga. 2005. "Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya". *CURES Working Paper*, No 05/01 January 2005.

Isdijoso, Brahmantio & Tri Wibowo. 2002. "Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2002.

Koswara, Ekom. 1996. "Faktor-faktro yan mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia : Suau Studi tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II Menurut UU No. 5 Tahun 1974". *Disertasi*. Fakultas Ekonomi Sosial Politik UGM, Yogyakarta.

Lodewyk, Richard. 1999. Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara. *Tesis*. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muktiali, Mohammad. 2000. "Derajat Otonomi Fiskal Daerah di Indonesia : Studi Kasus pada 26 Dati II yang Menjadi Percontohan Otonomi Daerah". *Tesis*. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nanga, Munga. 1991. "Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Studi Kasus di Kabupaten Malang, Probolinggo, dan Trenggalek (Propinsi Jawa Timur)". *Tesis*. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemeintah Daerah, 1999.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Daerah, 1999.

Smith, Roger S. 1991. "Financing Cities in Developng Countries". *International Monetary Fund Staff Paper*, Vol. 7 No. 21.

Sodik, Jamzani & Didi Nuryadin. 2005. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 6 Nomor 2, Oktober 2005.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta.

Way, Yakobus. 1999. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Sorong, Jayapura dan Jaya Wijaya". *Tesis*. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.